

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka guna memaparkan konsep dasar dari variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu membahas mengenai kerangka berfikir yang menjelaskan tentang model serta hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, kemudian diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dan dalam suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau suatu wilayah secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Beberapa ahli berpendapat mengenai pertumbuhan ekonomi, diantaranya menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang mantap dimana kapasitas produktif dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih besar. Sedangkan menurut Kunarjo (2003), pertumbuhan ekonomi adalah situasi yang menggambarkan produk domestik bruto per kapita suatu negara

yang mengalami peningkatan. Adapun menurut Nanga (2001), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu “proses”, bukan merupakan gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “*output perkapita*“. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu *output total* dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan *output perkapita* bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut *output perkapita* menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik (Boediono 2008). Menurut Sukirno (2006), teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain :

#### A. Teori Pertumbuhan Klasik

Dalam sejarah pemikiran ekonomi, para penulis ekonomi pada bagian kedua abad ke-18 dan permulaan abad ke-20 lazim digolongkan sebagai kaum Klasik. Kaum Klasik itu sendiri dibedakan menjadi dua golongan yaitu Klasik dan Neo-Klasik. Tokoh yang masuk ke dalam golongan Klasik diantaranya Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan John Stuart Mill. Ahli-ahli ekonomi klasik

dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan mempunyai pandangan yang agak berbeda diantara satu dengan yang lain.

Pandangan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Tulisan tersebut terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez-faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Mengenai faktor yang menentukan pembangunan, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi dan mengenai corak corak proses pertumbuhan ekonomi, Adam Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara kumulatif.

Pandangan Ricardo dan Mill bertentangan dengan pandangan Adam Smith mengenai pola proses pembangunan yang sangat optimis, mereka memiliki pandangan yang lebih pesimis tentang akhir dari proses pembangunan jangka panjang. Kedua ahli ekonomi Klasik ini berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *stationary state* yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.

Menurut pandangan para ekonom Klasik, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam serta tingkat teknologi. Akan tetapi, dalam teori klasik ini para ahli ekonomi menempatkan penambahan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi memiliki

pandangan bahwa hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berarti disini pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara terus menerus.

Para ahli menggambarkan apabila jumlah penduduk sedikit, dan kekayaan alam relatif banyak maka tingkat pengambilan modal dari investasi yang dihasilkan tinggi, sehingga disini para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan menciptakan investasi baru yang pada akhirnya akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, ketika pertumbuhan penduduknya terlalu banyak maka penambahan penduduk tersebut akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk menjadi negatif, kemakmuran masyarakat menurun, dan tingkat pertumbuhan ekonomi akan rendah.

#### B. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan ekonomi ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Kedua ahli ini menggunakan proses perhitungan yang berbeda, tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar melihat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

- Perekonomian bersifat tertutup,
- Hasrat menabung ( $MPS=s$ ) adalah konstan
- Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constan return scale*)

- Tingkat pertumbuhan angkatan kerja konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap serta perekonomian terdapat dari dua sektor ( $Y = C + I$ )

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis, bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan berikut:

$$g = K = n$$

Dimana:  $g$  = growth (pertumbuhan)

$K$  = capital (tingkat pertumbuhan modal)

$n$  = tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya pada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulan menunjukkan, bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

### C. Teori Pertumbuhan Schumpeter

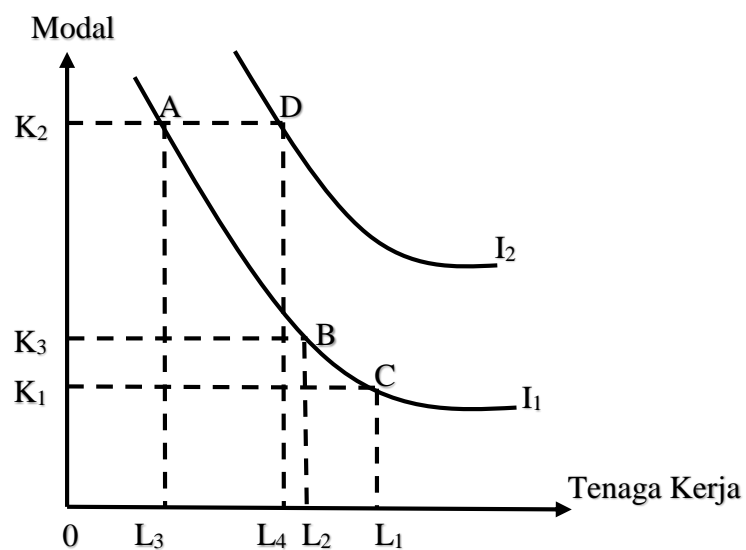
Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, karena kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*)

dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil resiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, akan tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Selain itu, didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi, sehingga produksi agregat akan bertambah. Selanjutnya, jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi, maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang. Hal ini disebabkan masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya, sehingga jalannya pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat dan pada akhirnya mencapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud disini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah.

#### D. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang

saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L). Sifat teori Neo-klasik bisa digambarkan sebagai berikut:



Fungsi produksi ditunjukkan oleh  $I_1$ ,  $I_2$ , dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat *output* tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan *output* sebesar  $I_1$ , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain (a)  $K_3$  dengan  $L_3$ , (b)  $K_2$  dengan  $L_2$ , dan (c)  $K_1$  dengan  $L_1$ . Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat *output* tidak mengalami perubahan. Disamping itu, jumlah *output* dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar  $K_3$ , jumlah *output* dapat diperbesar menjadi  $I_2$ , jika tenaga kerja ditambah  $L_3$  menjadi  $L_4$ . Arsyad (2004: 62).

Teori pertumbuhan Neo-Klasik mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh dua penulis Amerika, yaitu Charles Cobb dan Paul Douglas, yang sekarang lazim dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Dimana:

$Y_t$  = tingkat produksi tahun  $t$

$T_t$  = tingkat teknologi pada tahun  $t$

$K_t$  = jumlah stok barang-barang modal pada tahun  $t$

$\alpha$  = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

$\beta$  = pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik, laju tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai suatu negara tergantung kepada tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan pendapatan negara (produksi marjinal modal) dikalikan dengan tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan pendapatan negara (produktivitas marjinal tenaga kerja) dikalikan dengan tingkat pertambahan tenaga kerja.

Oleh karena itu, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal



*output* dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, penambahan penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas *capital* meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori Neo-Klasik sebagai penerus dari teori Klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna, karena dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model Klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Hal lain yang harus diusahakan, menurut teori Neo-Klasik, adalah terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan, bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu tingkat *saving* yang tinggi dan reinvestasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi ke depan lebih stabil.

#### **2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Menimbulkan Pertumbuhan Ekonomi**

Sukirno (2005) mengemukakan faktor-faktor yang bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi:

### 1. Peranan Sistem Pasar Bebas

Sistem mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Oleh sebab itu, pemerintah tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Fungsi pemerintah perlu dibatasi pada penyediaan fasilitas-fasilitas yang menggalakan perkembangan kegiatan pihak swasta, infrastruktur, pengembangan pendidikan dan kinerja pemerintah yang efisien sebagai langkah-langkah yang akan membantu pihak swasta.

### 2. Perluasan Pasar

Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk menjual produknya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi.

### 3. Spesialis dan Kemajuan Teknologi

Perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakkan akan memungkinkan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Spesialisasi dan perluasan kegiatan ekonomi akan menggalakkan perkembangan teknologi dan peningkatan produktivitas. Kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan pekerja dan kenaikan ini akan memperluas pasaran. Keadaan ini akan mengembangkan spesialisasi, sehingga siklus ini mengakibatkan perekonomian terus berkembang.

Kemudian untuk mengetahui besar kecilnya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara atau daerah dilihat dari produktivitas atau *output* yang di hasilkan dari Negara atau daerah tersebut dalam hal ini adalah PDB untuk suatu negara dan PDRB untuk suatu daerah dimana PDB merupakan penjumlahan dari semua barang

dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu (satu tahun).

## **2.1.2 Pajak**

### **2.1.2.1 Penerimaan Pajak**

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)), menyatakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapat negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi perang utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan Undang-Undang) yang diterima oleh negara lain dalam suatu periode yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah

tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat Resmi (2013: 3), yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2007: 6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula dengan barang mewah.

Dari kedua penjelasan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat diambil inti dari fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan sebagai sumber pemasukan negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara.
2. Fungsi mengatur sebagai alat yang digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap barang mewah.

### **2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Self Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

#### **2.1.2.4 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011: 8), hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

#### **2.1.2.5 Penggolongan Pajak**

Pajak menurut Resmi (2013: 43) dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya

dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak langsung (jadi langsung dikenakan pada subjeknya). Dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objektifnya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat kaitannya dengan objek pajak, yang selain daripada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Besarnya tidak ditentukan oleh keadaan wajib pajak. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung pada subjeknya. Dimulai dengan objeknya, seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lain-lain. Baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya, yaitu subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Pembebanannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan membayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.

3. Menurut kewenangannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunannya.

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

### **2.1.3 Investasi**

Investasi merupakan salah satu faktor penting dan utama dalam pembangunan ekonomi yang telah diakui oleh banyak ahli ekonomi, bahkan dikatakan bahwa tak ada pembangunan tanpa investasi. Tujuan utama kegiatan investasi dilakukan oleh para investor atau perusahaan yaitu untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Menurut Soekirno (2010) investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga,



tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, ramalan kondisi ekonomi kedepan dan faktor-faktor lainnya.

Mankiw (2007) berpendapat bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan dimasa depan. Investasi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu investasi tetap bisnis (*bussiness fixed investment*), investasi residensial (*residential investment*), dan investasi persediaan (*inventory investment*). *Bussiness fixed investment* mencakup peralatan dan sarana yang digunakan perusahaan dalam proses produksinya, sementara *residential invesment* meliputi pembelian rumah baru, baik yang akan ditinggal oleh pemilik sendiri maupun yang akan disewakan kembali, sedangkan *inventory investment* adalah barang yang disimpan oleh perusahaan di gudang meliputi bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan barang jadi.

Dalam Teori Klasik yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memproduksi. Dengan meningkatkan jumlah produksi masyarakat, maka akumulasi modal yang terbentuk nantinya akan meningkatkan investasi. Para ahli ekonom Klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil (Nopirin, 2000).

Sedangkan dan Teori Keynes, besarnya investasi yang dilakukan tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga, tetapi tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang diterima rumah tangga. Makin tinggi pendapatan yang

diterima oleh rumah tangga, makin besar pula investasi yang dilakukan. Menurut Keynes, investasi hanya bergantung pada dua faktor, yaitu perkiraan tingkat keuntungan yang tinggi yang diharapkan dari sebuah investasi dan tingkat bunga. Keynes mendasari teori tentang investasi berdasarkan konsep *Marginal Efficiency Of Capital* (MEC) bahwa jumlah maupun kesepakatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep keuntungan yang akan diharapkan dari investasi atau biasa disebut *Marginal Efficiency Of Investment* (MEI), maksudnya investasi akan dilakukan apabila MEI lebih besar dari tingkat bunga. Apabila tingkat bunga tinggi jumlah usaha yang tingkat pengembalian modalnya melebihi tingkat tersebut adalah sedikit, maka investasi tidak terjadi (Mannulang, 2002).

#### **2.1.3.1 Foreign Direct Investment (FDI)**

Investasi dari luar negeri dapat memiliki beberapa bentuk. Pertama, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* / FDI) yaitu investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas luar negeri. Kedua, investasi portofolio luar negeri (*Foreign Portfolio Investment*) yaitu investasi yang dibiayai oleh luar negeri namun dioperasikan oleh warga domestik.

Menurut Sianipar dan Panjaitan (2008) penanaman modal asing secara langsung menurut *Organization For Economic Cooperation* (OECD) memberikan rumusan bahwa *direct investment is meant acquisition of sufficient interest in an undertaking to ensure its control by the investor* (suatu bentuk penanaman modal asing dimana penanam modal diberi keleluasaan penguasaan dan penyelenggaraan pimpinan dalam perusahaan dimana modalnya ditanam, dalam arti bahwa penanam modal mempunyai penguasaan atas modalnya).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penanaman modal luar negeri dan modal asing. Pengertian-pengertian ini terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Dalam Undang-Undang hanya mengatur penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung. Sedangkan mengenai bidang-bidang usaha tidak terdapat dalam Undang-Undang ini, tetapi terdapat dalam peraturan pelaksanaan yang berupa Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal serta Peraturan Presiden RI Nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007.

Menurut Krugman dalam Sarwedi (2002) yang dimaksud dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari

suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu, tidak terjadi pemindahan sumber daya tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan diluar negeri. Penanam modal langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas yang bedaya saing di tingkat internasional. *Foreign Direct Investment* tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam *corporate governance mechanism*.

Menurut Feldstein (2000) aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (1) Aliran modal tersebut mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan deversifikasi melalui investasi; (2) Integrasi global pasar modal dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan *corporate governance, accounting rules*, dan legalitas; dan (3) Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah.

*Foreign direct investment* (FDI) terdiri dari *inward* dan *outward*. *Inward foreign direct investment* adalah investasi dari mancanegara ke dalam negeri, sedangkan *outward foreign direct investment* merupakan investasi ke negara lain. *Foreign Direct Investment* (FDI) bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (*home country*) bisa mempengaruhi perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (*host country*) baik

sebagian atau seluruhnya. Negara penerima (*host country*) *Foreign Direct Investment* akan menerima keuntungan antara lain adanya dalih teknologi dalam bentuk varietas baru dari capital input yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan (*financial investment*) atau perdagangan barang dan jasa. *Foreign Direct Investment* juga dapat mempromosikan kompetisi pada pasar domestik (*domestic output market*). Penerima *Foreign Direct Investment* (FDI) memberikan pelatihan bagi karyawan yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan sumberdaya manusia di *host country*. Laba yang dihasilkan oleh *Foreign Direct Investment* (FDI) juga memberikan kontribusi terhadap pajak pendapatan (Razin dan Sakda, 2002). Indonesia dapat juga menjadi kedua-duanya yaitu sebagai *home* dan *host country*. Sebagai *host country* atau negara tujuan, investasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. *Foreign direct investment* (FDI) dapat dilakukan dengan membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan di negara tujuan.

Menurut Sarwedi (2002), tiga kondisi perusahaan ingin melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) antara lain :

1. Perusahaan harus memiliki keunggulan kepemilikan dibanding perusahaan lain
2. Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI) tersebut harus lebih menguntungkan daripada menjual atau menyewakan
3. Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI) harus lebih menguntungkan dengan menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi dengan paling tidak beberapa input yang beralokasi di luar negeri.

Feldein (2002) memaparkan keuntungan dari Foreign Direct Investment (FDI), yaitu:

1. Aliran modal tersebut mengurangi risiko dari kepemilikan modal dengan melakukan deversifikasi melalui investasi.
2. Integrasi global pasar dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas.
3. Mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah.

Dibukanya pintu bagi modal asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967 meningkatkan arus modal asing meningkat pesat dan dapat meningkatkan pembangunan dalam negeri. Peraturan UU tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007. Adanya UU PM No.25/2007 ini harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Keberhasilan pembangunan dicerminkan dari tingginya Gross Domestic Product (GDP) tidak dapat dipisahkan dari peran investasi asing.

*Foreign Direct Investment* (FDI) mempunyai pengaruh positif terhadap upah tenaga kerja pada industri-industri penerima (*receipt industry*). *Foreign Direct Investment* (FDI) dapat berbentuk penyertaan modal secara langsung, teknologi dan keterampilan manajerial atau secara tidak langsung melalui efek *spillover* (penyebaran) pengetahuan pada perusahaan lokal. Menurut David K Eitman

(Yeung, 1994) menyatakan bahwa motif yang mendasari kegiatan penanaman modal asing adalah motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif strategis adalah usaha mencari pasar, mencari pengetahuan dan mencari keamanan politik. Beberapa hal yang termasuk ke dalam motif perilaku adalah rangsangan bagi lingkungan eksternal yang berdasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu, sedangkan yang termasuk ke dalam motif ekonomi adalah usaha mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga saham perusahaan. Motif-motif lain untuk menggunakan *Foreign Direct Investment* (FDI) biasanya terkait dengan efisiensi biaya, seperti menggunakan faktor-faktor produksi asing, bahan baku atau teknologi. Selain terlibat dalam perusahaan multinasional, *Foreign Direct Investment* (FDI) dipakai untuk melindungi *market share* luar negeri, untuk bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar, atau untuk menghindari hambatan perdagangan.

Keuntungan FDI bagi Indonesia meliputi:

1. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta orang, merupakan suatu pasar potensial dan sumber tenaga kerja yang kompetitif.
2. Lokasi Indonesia di Asia Tenggara yang strategis menghubungkan beberapa rute pelayaran internasional yang vital.
3. Ekonomi terbuka berorientasi pasar dengan rezim pertukaran valuta asing yang bebas.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan (selanjutnya diubah dengan

Peraturan Pemerintah No. 83/2001), kepemilikan modal PMA tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga untuk warga negara Indonesia atau BUMN.

5. Melalui Penanaman Modal Asing (PMA), modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah.
6. Negara turut menikmati manfaat PMA melalui setoran oajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing.
7. Secara politis, pemerintah negara asal PMA umumnya lebih “lunak” pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusahanya di Indonesia.
8. Dapat diharapkan terjadinya alih-teknologi.

Ada beragam fasilitas yang diberikan bagi pemodal asing yang diberikan oleh UU PM No.25/ 2007, antara lain:

1. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan *netto* sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.
2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.



4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat
6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Selain fasilitas, ada pula kebijakan pembatasan usaha bagi pelaku usaha asing, yaitu:

1. Adanya daftar negatif investasi (DNI) yang secara berkala direview
2. Kewajiban divestasi
3. Kewajiban untuk membangun kemitraan dengan usaha kecil & menengah (Kemitraan UKM)
4. Kewajiban memprioritaskan *local content* (prioritas konten lokal)
5. Kewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
6. Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
7. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
8. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.
9. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki dampak positif bagi suatu negara antara lain adalah terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, terbangunnya skill dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, terbangunnya semangat

kewirausahaan pada pengusaha lokal dapat lebih meningkatkan penghasilan yang cukup dan layak, pengusaha lokal lebih terpacu untuk berpartisipasi bersama dengan asing dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermutu, negara dapat memperoleh pemasukan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari beragam aktifitas kegiatan usaha, sehingga pada gilirannya kualitas hidup seluruh masyarakat dapat meningkat. Selain itu *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki sejumlah efek negatif bagi kepentingan nasional. Dampak negatif sering muncul ketika badan penanaman modal dan pemberi ijin yang merupakan pemegang kewenangan tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta penindakan yang dijalankan secara konsisten, selain itu kebijakan dan aturan yang ada secara komprehensif tidak mengatur hal-hal teknis, agar memudahkan pembinaan, pengawasan, serta penindakan.

### **2.1.3.2 Teori Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*)**

Menurut Muchammad Ardiansyah dalam orasi ilmiahnya “Teori-Teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal”, mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauannya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi. Adapun teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan kebijakan hukum investasi, adalah:

1. Teori Klasik dan Neo Klasik (*The Classical and Neo Classical Theory on Foreign Investment*)

Teori ekonomi klasik dalam penanaman modal asing menyatakan bahwa penanaman modal asing secara keseluruhan menguntungkan ekonomi

negara penerima modal. Adapun faktor yang mendukung pandangan teori klasik dan neo klasik, yaitu:

- a. Pertama, merupakan fakta bahwa modal asing yang dibawa ke negara pemilik modal menjamin bahwa modal nasional/domestic yang tersedia dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Masuknya modal dan penanaman modal asing kembali oleh penanaman modal asing yang berasal dari keuntungan yang tidak dikembalikan ke negaranya, akan meningkatkan tabungan dari negara penerima modal. Penghasilan pemerintah melalui pajak meningkat dan pembayaran-pembayaran lain juga akan meningkat.
- b. Kedua, penanaman modal asing biasanya membawa serta teknologi yang terdapat di negara pemilik modal dan menyebarkan teknologi tersebut di dalam negara penerima modal.
- c. Ketiga, dengan masuknya modal asing berarti terciptanya lapangan baru. Tanpa penanaman modal asing kesempatan untuk bekerja tidak akan didapat.
- d. Keempat, pekerja-pekerja yang dipekerjakan pada perusahaan penanaman modal asing akan mendapatkan keahlian sehubungan dengan teknologi yang dibawa dan diperkenalkan oleh penanam modal asing. Keahlian dalam bidang manajemen dari proyek-proyek besar akan beralih kepada tenaga ahli lokal.
- e. Kelima, fasilitas-fasilitas infrastruktur akan dibangun baik oleh pemerintah maupun perusahaan penanaman modal asing dan semua

fasilitas seperti transportasi, kesehatan, pendidikan yang diperuntukkan bagi penanaman modal asing akan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pendapat yang sangat mendasar dari teori Neo-Klasik menurut Chandrawulan (2011) adalah bahwa penanaman modal asing khususnya negara berkembang, memainkan peran sebagai tutor. Penanaman modal asing menggantikan fungsi produksi yang lebih rendah di negara industri yang masuk melalui alih teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran, informasi pasar, pengalaman organisasi, penemuan-penemuan produk baru dan teknik produksi, serta pelatihan-pelatihan pekerja, khususnya perusahaan multinasional yang dianggap sebagai agen yang berguna bagi pengalihan teknologi dan ilmu pengetahuan.

#### 1. Teori Kebergantungan (*The Dependency Theory*)

Menurut Sonarajah (2010) teori ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak

mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing.

Menurut Chandarawulan (2011) perkembangan ekonomi negara berkembang dirasakan lamban karena berbagai alasan yaitu:

- a. Pertama, penanaman modal asing langsung yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya menegakkan kebijakan global bagi kepentingan negara-negara maju yang kantor pusat dan pemilik sahamnya berada di negara pemilik modal. Negara pemilik modal dari penanaman modal asing menjadi pusat ekonomi negara penerima modal hanya sebagai pelayan ekonomi yang tidak penting bagi pusat ekonomi.
- b. Kedua, masuknya atau mengalirnya modal ke negara berkembang, terdapat ketentuan bahwa modal yang ditanam dan keuntungan yang diperoleh di negara penerima modal asing dapat dikembalikan ke negaranya. Berdasarkan ketentuan ini, dalam praktik penanaman modal asing mengembalikan baik modal asal maupun keuntungan dua kali lipat dari modal yang mereka bawa.
- c. Ketiga, penanaman modal asing menggunakan kekayaan alam tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan setempat, sebagai akibatnya mereka kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan.

## 2. Teori Penengah (*The Middle Path Theory*)

Teori penengah dikenal juga sebagai teori yang mengedepankan peran pemerintah atau negara dalam melakukan strategi pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara berkembang. Menurut teori ini, negara-negara harus merumuskan dan menyusun serta mengikuti tujuan-tujuan yang tidak mudah dilakukannya sebagai permintaan atau kepentingan dari kelompok-kelompok sosial, kelas-kelas atau masyarakat dalam wilayahnya (Chandrawulan, 2011).

### **2.1.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Foreign Direct Investment* (FDI)**

Menurut Muana Nanga, (2001) faktor-faktor yang menentukan *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat suku bunga, terdapat hubungan negatif antara jumlah investasi dan tingkat bunga. Jika tingkat suku bunga naik level investasi akan berkurang, sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah orang akan berbondong-bondong menanamkan investasi diberbagai bidang usaha.
2. Inovasi dan teknologi, adanya temuan-temuan baru yang menyebabkan cara-cara berproduksi lama menjadi tidak efisien. Untuk itu perusahaan-perusahaan perlu menanamkan investasi untuk membeli mesin-mesin dan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih.
3. Tingkat perekonomian, makin banyak aktifitas perekonomian makin besar pendapatan nasional, dan makin banyak bagian pendapatan yang dapat ditabung. Yang pada akhirnya akan diinvestasikan pada usaha-usaha yang menguntungkan.

4. Ramalan atau harapan orang tentang perekonomian dimasa datang, jika oarang meramal perekonomian dimasa yang akan datang cerah, oarang akan giat melakukan investasi sekarang.
5. Tingkat keuntungan perusahaan, makin besar tingkat keuntungan perusahaan makin banyak bagian laba yang dapat ditahan (*retained earnings*) dan bagian laba yang ditahan ini dapat digunakan untuk tujuan investasi.
6. Situasi politik, jika situasi politik aman dan pemerintah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi perusahaan maka tingkat investasi akan tinggi. Dan sebaliknya jika pemerintah tidak banyak memberikan kemudahan bagi perusahaan banyak menghadapi birokrasi yang berbelit-belit maka tingkat investasi akan rendah.

Faktor-faktor yang dapat menjadi motivasi bagi investor asing untuk melakukan FDI di suatu negara adalah:

1. *Access to Mineral / Natural Resources.*

Orientasi dari penanaman modal asing ini hanyalah untuk memperoleh sumber daya yang lebih murah dan efisien dimana sumber daya di negara asalnya sudah tidak lagi mencukupi, namun begitu dapat berorientasi terhadap perdagangan dimana negara investor berkeinginan mengimpor komoditas yang sudah kehilangan komparatifnya apabila diproduksi di negara asal investor.

## 2. Menghindari hambatan tarif

Tarif untuk suatu produk yang akan masuk di suatu negara dapat menghambat jalur perdagangan dan dapat mengurangi tingkat keuntungan, sehingga mendirikan perusahaan di negara tersebut merupakan upaya untuk menghindari tarif tersebut.

## 3. *Domestic Market Oriented*

Pasar dari negara tuan rumah sangat menjanjikan dan dapat memperoleh profit yang lebih banyak jika dibandingkan dengan diproduksi di negara asalnya sendiri.

## 4. Tingkat upah pekerja yang relatif rendah

Kebanyakan upah di negara maju sudah terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kapital dan berkembangnya produk baru yang lebih intensif modal dan pengetahuan sehingga alternatif untuk membuka atau mendirikan usaha industrinya di negara lain menjadi lebih menguntungkan, terlebih jika negara tujuannya mempunyai upah tenaga kerja yang lebih murah dari negara asalnya.

### **2.1.4 Ekspor**

#### **2.1.4.1 Pengertian Ekspor**

Secara fisik ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat kegiatan mengekspor barang



dan jasa, pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi ekspor barang dilakukan oleh usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir, kecuali ditentukan oleh menteri. Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi eksportir bertanggungjawab sepenuhnya terhadap barang yang di ekspor. Pada Pasal 44 yang menjelaskan bahwa eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai eksportir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembatasan penetapan sebagai eksportir.

Sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, lalu lintas perdagangan internasional berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Bagi negara berkembang khususnya Indonesia, sumber pembiayaan yang berupa penerimaan devisa yang berasal dari kegiatan ekspor memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri adalah dengan jalan mengekspor hasil-hasil sumber daya alam ke luar negeri. Dari hasil devisa ini dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan dalam negeri. Banyak orang, institusi pemerintah, atau perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan barang ke luar negeri. Kegiatan tersebut disebut ekspor dan orang atau badan yang melakukannya dinamakan eksportir. Tujuan eksportir adalah untuk memperoleh keuntungan. Harga barang-barang yang diekspor ke luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan di dalam negeri. Jika lebih murah, eksportir tidak tertarik

untuk mengekspor barang yang bersangkutan. Tanpa kondisi itu, aktivitas ekspor tidak akan menarik dan menghasilkan keuntungan. Dengan adanya aktivitas ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak aktivitas ekspor, semakin besar devisa yang diperoleh negara. Umumnya barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan selain minyak bumi dan gas alam (non migas). Barang-barang yang termasuk migas diantaranya minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk non migas sebagai berikut:

1. Hasil industri. Contohnya kayu lapis, konfeksi kelapa sawit, peralatan kantor, bahan-bahan kimia pupuk dan kertas.
2. Hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya, gula, kelapa, karet, kopi dan kopra.
3. Hasil laut dan danau. Contohnya, ikan, udang dan kerang.
4. Hasil tambang non migas. Contohnya bijih emas, bijih nikel, bijih tembaga, batu bara.

Menurut Sukirno, kegiatan ekspor akan tetap menempati peranan penting sebagai penggerak ekonomi dalam negeri. Oleh sebab itu arah kebijaksanaan dibidang perdagangan ekspor ditujukan untuk meningkatkan ekspor barang khususnya komoditi non migas. Dipilihnya komoditi ekspor non migas karena harga minyak bumi di pasaran dunia mengalami kemerosotan. Hal ini berakibat terjadinya penurunan penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi. Untuk mengatasi situasi yang tidak menguntungkan maka pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas yaitu dengan mengadakan

diversifikasi penerimaan kearah peningkatan produksi serta peningkatan ekspor komoditi dan jasa-jasa non migas.

#### **2.1.4.2 Teori Ekspor**

##### **1. Teori Klasik dari Adam Smith**

Teori Klasik dikemukakan oleh Adam Smith dengan Teori Keunggulan Mutlak (*Absolut Advantage/Absolut Cost*) mengemukakan bahwa negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara ini memiliki keunggulan mutlak. Walaupun negara yang satu dengan negara yang lain sama-sama dapat menghasilkan dua jenis barang yang berbeda, tetapi salah satu dari kedua jenis barang tersebut harus dipilih. Dimana barang yang dipilih adalah barang yang lebih menguntungkan bagi suatu negara untuk menghasilkan sendiri yang didasarkan pada keuntungan mutlak (*absolute advantage*).

##### **2. Teori Klasik David Ricardo**

Teori Klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo dengan Teori Biaya Relatif (*Comparatif Cost*) yang mengemukakan bahwa nilai atau harga suatu *cost comparative* produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut teori *cost comparative advantage (labor effeciency)*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif kurang atau tidak efisien.

### 3. Teori Modern dari Heberler

Teori Heberler yang mengatakan harga barang dipasar bukan hanya disebabkan pemakaian tenaga kerja, tetapi merupakan kombinasi pemakaian faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Hebler menggunakan konsep *opportunity cost* atau *alternative*, yang dapat dijelaskan dengan *possibility curve* dan digabungkan dengan *indefendence curve* untuk melihat terjadinya perdagangan antar dua negara, dan sekaligus dapat memperlihatkan keuntungan dari perdagangan internasional tersebut.

### 4. Teori Modern dari Hecksher-Ohlin (HO)

Teori Hecksher-Ohlin (HO) menyatakan bahwa perdagangan internasional antar dua negara yang terjadi karena biaya alternatif (*opportunity cost*) berbeda antara kedua negara tersebut yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan tanah) yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Sehingga perdagangan struktur perdagangan luar negeri dari suatu negara tergantung pada ketersediaan dan intensitas pemakaian faktor-faktor produksi dan yang terakhir ditentukan oleh teknologi. Suatu negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang-barang relatif banyak di negara tersebut dan mengimpor barang yang input utamanya tidak dimiliki oleh negara-negara tersebut (jumlahnya terbatas).

### 5. Teori Moder dari Michael E. Porter

Teori menurut Michael E. Porter dalam era persaingan global saat ini, suatu bangsa atau negara yang memiliki *competitive advantage of nation* dapat

bersaing di pasar internasional bila memiliki empat faktor penentu yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, iptek, permodalan, prasarana. Permintaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keunggulan daya saing atau *competitive advantage* suatu bangsa atau perusahaan produk atau jasa yang dihasilkannya.

#### **2.1.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Berdasarkan faktor tersebut ada yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dibidang perdagangan luar negeri. Jika pemerintah memberikan kemudahan kepada para eksportir, eksportir terdorong untuk meningkatkan ekspor.
2. Keadaan pasar di luar negeri. Kekuatan permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga pasar dunia. Jika jumlah barang yang diminta di pasar dunia lebih sedikit dari pada jumlah barang yang ditawarkan, maka cenderung turun. Keadaan ini akan mendorong para eksportir untuk menurunkan ekspornya.
3. Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Eksportir harus pandai mencari dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas.

#### **2.1.4.4 Kebijakan Ekspor**

Ekspor suatu negara harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor dengan cara berikut:

1. Diversifikasi ekspor/menambah keragaman ekspor

Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang di ekspor. Misalnya Indonesia awalnya hanya mengekspor tekstil dan karet, kemudian menambah komoditas ekspor seperti kayu lapis, gas LNG, rumput laut dan sebagainya. Diversifikasi ekspor dengan menambah macam barang yang di ekspor ini dinamakan diversifikasi horizontal. Sedangkan diversifikasi ekspor dengan menambah variasi barang dengan di ekspor seperti karet diolah dahulu menjadi kain lalu diproses menjadi pakaian. Diversifikasi yang demikian disebut diversifikasi vertikal.

2. Subsidi ekspor

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang rendah.

3. Premi ekspor

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Pemberian bantuan keuangan dari

pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang orientasi usahanya ekspor.

#### 4. Devaluasi

Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi akan mengaibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing (dollar), sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional.

#### 5. Meningkatkan promosi dagang ke luar negeri

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan produk yang dijual. Untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri, misalnya dengan mengadakan pameran dagang di luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal.

#### 6. Menjaga kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing

Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan produk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. Bila kurs mata uang asing terlalu tinggi membuat para pengusaha yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akhirnya harga barang yang diproduksi oleh para pengusaha tersebut

menjadi mahal. Hal ini dapat menurunkan omzet penjualan dan menurunkan laba usaha, yang akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya.

#### 7. Mengadakan perjanjian kerjasama ekonomi internasional

Melakukan perjanjian kerjasama ekonomi baik bilateral, regional maupun multilateral bisa membuka dan memperluas pasar bagi produk dalam negeri di luar negeri serta dapat menghasilkan kontrak pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Misalnya perjanjian kontrak pembeli LNG (*Liquid Natural Gas*) Indonesia.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Pada Tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini, melalui penelitian terdahulu dapat diketahui pengaruh antar variabel X dengan Y yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
1.	Arfah Habib Saragih/2018/Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Independen: Penerimaan Pajak Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Independen: - Dependen: -	Secara umum penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi	Jurnal SIKAP Vol. 3, No. 1, Tahun 2018
2.	Rinaldi Syahputra/2017/Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Independen: Penerimaan Pajak, Ekspor Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Independen: Nilai Tukar Dependen: -	Secara statistik variabel penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan	Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 2 Oktober 2017



				ekonomi di Indonesia	
3.	Ika Musriana Siregar, Isena Pratiwi, Nurhasanah, Selpiana Sinaga/2019/Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode Tahun 2013-2017	Independen: Ekspor Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Independen: - Dependen: -	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Jurnal Ekonomi Pendidikan Voume 7 : Nomor 2 Juni 2019
4.	Ismadiyanti Purwaning Astuti, Fitri Juniwati Ayuningtyas/2018/Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	Independen: Ekspor Dependen: -	Independen: - Dependen: -	Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.	Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 19, No. 1, April 2018, Halaman 1-10
5.	Khairul Amri, Asi Aimon/2017/Pengaruh Pembentukan Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Independen: Ekspor Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Independen: Pembentukan Modal Dependen: -	Dalam jangka pendek ekspor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Economic Journal Open Access: economic.pjj.unp.ac.id
6.	Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir/2016/Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Independen: FDI Dependen: Pertumbuhan ekonomi Indonesia	Independen: Investasi Dalam Negeri Dependen: -	Penanaman Modal Asing (FDI) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2, No. 1, Maret 2016
7.	Delta Ananda Arga Putra, Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo/2017/Analisis	Independen: FDI Dependen:	Independen: Nilai Tukar, Government Expenditure	FDI mempunyai pengaruh positif	Jurnal Pendidikan, Vol. 2, No. 2, Bulan

	<i>Foreign Direct Investment, Nilai Tukar, dan Government Expenditure Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia</i>	Pertumbuhan ekonomi Indonesia	Dependen: -	terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Februari, Tahun 2017, Hal 294-303
8.	Bonaraja Purba/2020/Analsis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode tahun 2009-2018	Independen: FDI, Ekspor  Dependen: Pertumbuhan ekonomi Indonesia	Independen: Utang Luar Negeri  Dependen: -	FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia	Jurnal Humaniora, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020 : 244-255
9.	Bagaskara Prawira, Sudati Nur Sarfiah, Gentur Jalunggono/2019/Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1998-2017	Independen: FDI, Ekspor  Dependen: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Independen: Impor  Dependen: -	Dari hasil uji t diperoleh hasil FDI mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan Indonesia tahun 1998-2017 Dari hasil uji t diperoleh hasil ekspor mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1998-2017	DINAMIC: Directory Journal of Economics Volume 1 Nomor 1

10.	Ari Mulianta Ginting/2017/Analisis Pengaruh Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Independen: Ekspor  Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Independen: -  Dependen: -	Hasil analisis ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 11, No. 1, Juli 2017
-----	---	--	--	---	---

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah diterapkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara penerimaan pajak, *foreign direct investment* (FDI), dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui proses analisis data sebagaimana dapat dilihat dari kerangka teori.

### 2.2.1 Hubungan Penerimaan Pajak dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Soemitro (2003), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rinaldy Syahputra (2017) dan Arfah Habib Saragih (2018) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan memperoleh hasil bahwa penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Bahkan angkanya bisa di atas 80 persen dari total penerimaan negara. Maka, penerimaan pajak akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin besar penerimaan pajak yang masuk ke negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya. Terdapat hubungan negatif antara penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **2.2.2 Hubungan antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan pertumbuhan ekonomi**

Krugman dalam Sarwedi (2002) *Foreign Direct Investment (FDI)* adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri. Penanaman modal langsung mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas yang berdaya saing di tingkat internasional.

Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Syechalad, Muhammad Nasir (2016), Delta Ananda Arga Putra, Imam Mukhlis, Sugeng Hadi Utomo (2017), Bonarja Purba (2020), melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *Foreign Direct Investment* (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan memperoleh hasil bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan

dari pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. *Foreign Direct Investment* (FDI) diharapkan dapat memberikan manfaat seperti transfer teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi maupun efektivitas produksi perusahaan lokal maupun internasional. Maka terdapat hubungan yang positif antara *Foreign Direct Investment* (FDI) dengan pertumbuhan ekonomi.

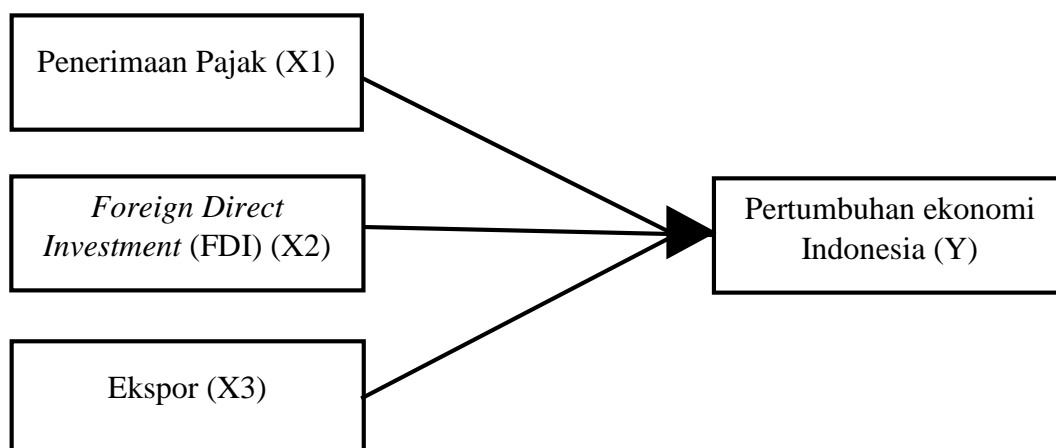
### **2.2.3 Hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi**

Amir M.S (2009), ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran valuta asing.

Ari Mulianta Ginting (2017), Ismadiyah Purwaning Astuti, Fitri Juniawati Ayuningtyas (2018), dan Bonarja Purba (2020) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan memperoleh hasil bahwa ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan teori *post neoclassical* bahwa ekspor memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Salvator (1990), mengeskakan bahwa ekspor merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi karena ekspor merupakan salah satu faktor utama bagi negara berkembang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor dan investasi yang dilakukan negara berkembang dapat mendorong output dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga peningkatan ekspor dapat menghasilkan devisa. Sehingga terdapat hubungan yang positif antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan penerimaan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam APBN, investasi yang dapat dilakukan berupa *Foreign Direct Investment* (FDI), dan ekspor diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai penerimaan pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan ekspor Indonesia dijadikan variabel-variabel independen yang secara parsial ataupun bersama-sama diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dibuat skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel yang mempengaruhinya sebagai berikut:



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui analisis terhadap bukti-bukti empiris. Berdasarkan acuan pada dasar kerangka pemikiran diatas, maka dapat diuraikan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial penerimaan pajak berpengaruh negatif, sedangkan *Foreign Direct Investment* (FDI), dan ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007-2019.
2. Diduga secara bersama-sama penerimaan pajak, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007-2019.